

Rapat Kerja Awal Tahun 2026, Perhutani Bondowoso Teguhkan Penerapan GCG dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Salsa - SURABAYA.TELISIKFAKTA.COM

Jan 6, 2026 - 10:37



Bondowoso - Perhutani (05/01/2026) | Mengawali Tahun 2026, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso melaksanakan Rapat Kerja internal sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan dan perencanaan strategis dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pendapatan perusahaan secara berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh segenap jajaran

manajemen, para Asisten Perhutani (Asper), serta seluruh Kepala Sub Seksi dan diselenggarakan di Kantor KPH Bondowoso, Senin (05/01/2026).

Rapat kerja tersebut merupakan implementasi dari siklus manajemen perusahaan kehutanan yang mengedepankan prinsip perencanaan berbasis kinerja (performance-based planning) serta pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). Agenda rapat meliputi evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, analisis kesenjangan (gap analysis) antara target dan realisasi, serta perumusan rencana kerja Tahun 2026 yang terintegrasi lintas sektor, mencakup Perencanaan Tanaman, Produksi Hasil Hutan, Pengamanan Hutan, Ekowisata, serta fungsi-fungsi pendukung lainnya.

Dalam arahannya, Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, menegaskan bahwa capaian kinerja yang telah melampaui target indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) pada Tahun 2025 harus dijadikan sebagai tolok ukur untuk mendorong peningkatan kinerja pada Tahun 2026.

“Apa yang telah menjadi capaian [Perhutani](#) KPH Bondowoso yang sudah melampaui target agar dipacu kembali di Tahun 2026. Pada sektor produksi, pengamanan hutan, dan tanaman, capaian tersebut minimal harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan teknis, efektivitas pengendalian operasional, serta konsistensi penerapan standar kerja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Misbakhul Munir menekankan bahwa seluruh pelaksanaan program kerja wajib berlandaskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagaimana diterapkan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Penerapan prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban harus diinternalisasikan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kinerja. Hal ini penting untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengelolaan risiko, serta peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pada sektor produksi kehutanan, peningkatan kinerja harus didukung oleh efisiensi pemanfaatan sumber daya, penerapan kaidah silvikultur yang tepat, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan regulasi teknis. Sementara itu, pada sektor tanaman, keberhasilan pembangunan hutan tanaman perlu ditopang oleh perencanaan berbasis data biofisik, kesesuaian lahan, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur untuk menjamin keberhasilan daur dan keberlanjutan tegakan.

Pada aspek pengamanan hutan, Administratur KPH Bondowoso menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hutan melalui pendekatan preventif, penegakan disiplin operasional, serta peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Keamanan hutan merupakan prasyarat utama dalam menjaga kesinambungan fungsi produksi dan fungsi lindung, sehingga pengamanan harus dilaksanakan

secara sistematis, terukur, dan berbasis analisis risiko,” ujarnya.

Selain aspek teknis kehutanan, Misbakhul Munir juga menyoroti pentingnya pengelolaan komunikasi kelembagaan dan publikasi eksternal sebagai bagian dari implementasi GCG. Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif merupakan instrumen strategis dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi perusahaan.

“Komunikasi dan publikasi dengan pihak eksternal yang selama ini telah berjalan baik agar terus dijaga dan ditingkatkan sebagai wujud pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan penguatan citra Perhutani sebagai BUMN yang profesional dan akuntabel,” tambahnya.

Melalui rapat kerja ini, Perum Perhutani KPH Bondowoso menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, profesionalisme sumber daya manusia, serta inovasi dalam pengelolaan hutan. Dengan penerapan prinsip GCG yang konsisten, pendekatan ilmiah dalam pengelolaan kehutanan, serta sinergi lintas sektor, KPH Bondowoso optimistis mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, produktif, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan kehutanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. @Red.